

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

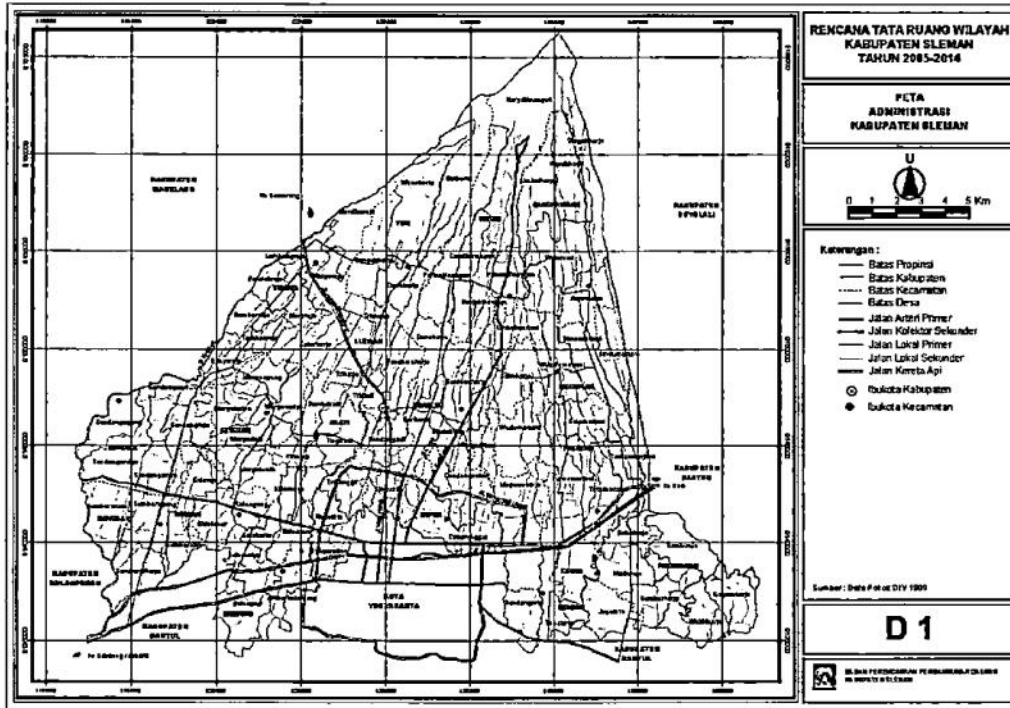
A. Profil Kabupaten Sleman

1. Keadaan Umum Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman adalah salah satu dari 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di sisi utara. Wilayah Kabupaten Sleman membentang ke arah lereng gunung merapi, gunung berapi yang termasuk 10 besar teraktif di dunia dan berketinggian 2.968 meter. Dengan posisi tersebut, wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu propinsi DIY.

Pengembangan wilayah Kabupaten Sleman tidak terlepas dari kondisi Sleman sebagai bagian integral dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan kondisi, potensi wilayah dan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan pembangunan Kabupaten Sleman diarahkan sebagai pusat pendidikan, pusat kebudayaan, penghasil pangan, daerah tujuan wisata, pengembangan industri kecil, agro industri dan industri jasa. Bahkan dalam perkembangannya, Kabupaten Sleman diibaratkan miniatur Indonesia, karena latar belakang budaya masyarakat Sleman yang berasal dari berbagai suku di Indonesia. Walaupun demikian kehidupan masyarakat Sleman baik penduduk asli dan pendatang sehari-hari tetap menjunjung tinggi nilai budaya Yogyakarta, dengan ciri khas sikap gotong royong yang tinggi dan sikap ramah tamah.

2. Keadaan Geografi dan Iklim Kabupaten Sleman



Gambar 2.1: Peta Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman secara geografis terletak di antara $107^{\circ} 15' 03''$ dan $100^{\circ} 29' 30''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 04' 03''$ Lintang Selatan. Jarak terjauh Utara-Selatan 32 Km, Timur-Barat 35 Km.

Wilayah Kabupaten Sleman seluas 18 % dari luas wilayah Propinsi DIY atau seluas 57.482 ha. Dari luas wilayah tersebut dimanfaatkan untuk tanah sawah seluas 23.426 ha (40,75 %), tanah tegalan seluas 6.429 ha (11,18 %), tabah pekarangan seluas 18.794 ha (32,69 %), hutan rakyat seluas 1.592 ha (2,77 %), hutan negara seluas 1.335 ha (2,32 %), kolam seluas 370 ha (0,64 %) dan lain-lain seluas 5.536 ha (9,63 %).

Batas-batas wilayah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul dan Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY.
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kulonprogo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Iklim di wilayah Kabupaten Sleman termasuk tropis dengan musim hujan antara november–april dan musim kemarau antara mei–oktober. Curah hujan rata-rata bekisar antara 1500-3000.

3. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman

Prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Sleman dirumuskan sebagai berikut.

a. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik

Prioritas pembangunan untuk mewujudkan pemerintahan Daerah/Kabupaten yang baik dilakukan melalui pembangunan dibidang hukum, bidang politik, bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang komunikasi, informasi dan media masa, bidang ketentraman dan ketertiban.

b. Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Daerah

Untuk meningkatkan kegiatan ekonomi daerah, prioritas pembangunan dibidang ekonomi meliputi industri, pertanian dan kehutanan, sumber daya air dan

irigasi, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pengembangan usaha dan keuangan daerah, transportasi, pertambangan, energi dan pariwisata.

c. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Prioritas pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui pembangunan bidang agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemuda dan olah raga, kependudukan, keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan dan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, kebudayaan dan kesenian.

d. Meningkatkan Kapasitas Pengembangan Potensi Wilayah

Prioritas pembangunan dalam rangka meningkatkan kapasitas pengembangan potensi wilayah dilaksanakan melalui pembangunan bidang pedesaan dan perkotaan, pemanfaatan ruang, pertanahan, perumahan dan pemukiman, wilayah perbatasan serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.

4. Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan Kabupaten Sleman meliputi: wilayah administrasi, penduduk, aparat pemerintahan, pemerintah daerah, pemerintahan umum, keamanan dan ketertiban, serta pertanahan.

a. Wilayah Administratif

Jumlah pembagian wilayah administratif di Kabupaten Sleman pada tahun 2010 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Sleman

NO	KECAMATAN	BANYANYA				LUAS (H)
		DESA	PEDUKUHAN	RW	RT	
1	Mayudan	4	65	151	353	2.762
2	Minggir	5	68	151	338	2.727
3	Seyegan	5	67	149	377	2.663
4	Godean	7	77	177	411	2.684
5	Gamping	5	59	188	532	2.925
6	Mlati	5	74	203	553	2.852
7	Depok	3	58	230	676	3.555
8	Berbah	4	58	143	350	2.299
9	Prambanan	6	68	162	377	4.135
10	Kalasan	4	80	189	547	3.584
11	Ngemplak	5	82	201	464	3.571
12	Ngaglik	5	87	221	563	3.582
13	Sleman	6	83	209	485	3.132
14	Tempel	8	98	207	470	3.249
15	Turi	4	54	118	273	4.309
16	Pakem	5	61	138	299	4.384
17	Cangkringan	5	73	151	307	4.799
	JUMLAH	86	1.212	2.988	7.375	57.482

Sumber: BPS Kab. Sleman Tahun 2009

Secara administratif Kabupaten Sleman terbagi 86 desa dan 17 kecamatan.

Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sleman sebagai berikut:

Untuk membantu pelaksanaan pemerintah desa di Kabupaten Sleman terdapat 1.212 dusun, 2.988 RW dan 7.375 RT. Dengan mempertimbangkan status Kabupaten Sleman sebagai hiterland dari kota Yogyakarta maka dari 86 desa yang ada 27 desa terkategoriikan sebagai desa pedesaan dan 59 desa merupakan desa perkotaan.

b. Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Sleman pada tahun 2005 sampai 2009 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman

NO	TAHUN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH
		JIWA	%	JIWA	%	
1	2005	482.810	50.55	472.314	49.45	955.124
2	2006	521.170	51.69	487.094	48.31	1.008.264
3	2007	513.912	50.05	512.792	49.95	1.026.704
4	2008	524.725	50.44	515.495	49.56	1.040.220
5	2009	547.731	49.65	555.411	50.35	1.103.142

Sumber: BPS Kab. Sleman

Menurut registrasi penduduk pada akhir tahun 2009, jumlah penduduk Sleman tercatat 1.103.142 jiwa, terdiri dari 547.731 laki-laki dan 555.411 perempuan. Jadi jelas bahwa dari tahun 2005 sampai akhir tahun 2009 kepadatan penduduk di Kabupaten Sleman selalu bertambah. Dengan luas wilayah 57.482 km², maka kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Sleman adalah 1.658 jiwa per km².

c. Aparatur Pemerintah

Tabel 2.3
Jumlah Aparatur Pemerintah Kabupaten Sleman
Tahun 2010

NO	URAIAN	TAHUN					SATUAN
		2005	2006	2007	2008	2009	
a.	Jumlah PNS menurut golongan						
	1) Golongan I	162	98	184	201	228	orang
	2) Golongan II	1410	2.147	2.500	2.601	2.788	orang
	3) Golongan III	6.324	5.955	5.720	5.271	4.985	orang
	4) Golongan IV	4.244	4.593	4.899	5.283	5.501	orang
	Jumlah Pejabat struktural						
b.	1) Eselon I	0	0	0	0	0	orang
	2) Eselon II	20	20	20	20	27	orang
	3) Eselon III	106	102	101	101	141	orang
	4) Eselon IV	400	395	394	385	523	orang
c.	Jumlah Pejabat Fungsional	8.746	8.700	9.095	9.177	9.202	orang
d.	Jumlah Staf Umum	3.664	3.575	3.693	3.673	3.605	orang

Sumber: BKD Kab. Sleman Tahun 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 sampai 2009 banyaknya pegawai Golongan I, semakin meningkat, Golongan II, pada tahun 2009 sebanyak 2.788 orang pegawai, 4.985 orang pegawai golongan III pada tahun 2009, tahun 2007 dan 2008 jumlah pegawai Golongan III menurun berbeda dengan jumlah pegawai golongan yang lainnya yang semakin meningkat dan pada tahun 2009 jumlah pegawai 5.501 orang adalah pegawai golongan IV.

Dari jumlah pejabat struktural pada tahun 2005 sampai 2009 jumlah pegawai eselon I tidak ada, pada 2005 jumlah pegawai Eselon II, 20 orang pegawai sampai tahun 2008 jumlah tersebut tidak berubah sedangkan tahun 2009 jumlah tersebut meningkat menjadi 27 orang pegawai. Tahun 2009 jumlah pegawai 141 pegawai Eselon III, mulai pada tahun 2006 sampai 2008 jumlah pegawai eselon III menurun dibandingkan tahun 2005. Dan 523 orang adalah pegawai eselon IV.

Jumlah pejabat fungsional tahun 2005 adalah 98.746 orang jumlah tersebut terus menurun dari tahun 2006 sampai tahun 2007, tahun 2008 jumlah pejabat fungsional 9.177 dan pada tahun 2009 semakin meningkat menjadi 9.202 orang. Dan 3,605 orang adalah jumlah staf umum pada tahun 2009.

B. Deskripsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman adalah lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Daerah Nomor : 12/Perda/2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Nomor: 11/Kep.KDH/2001

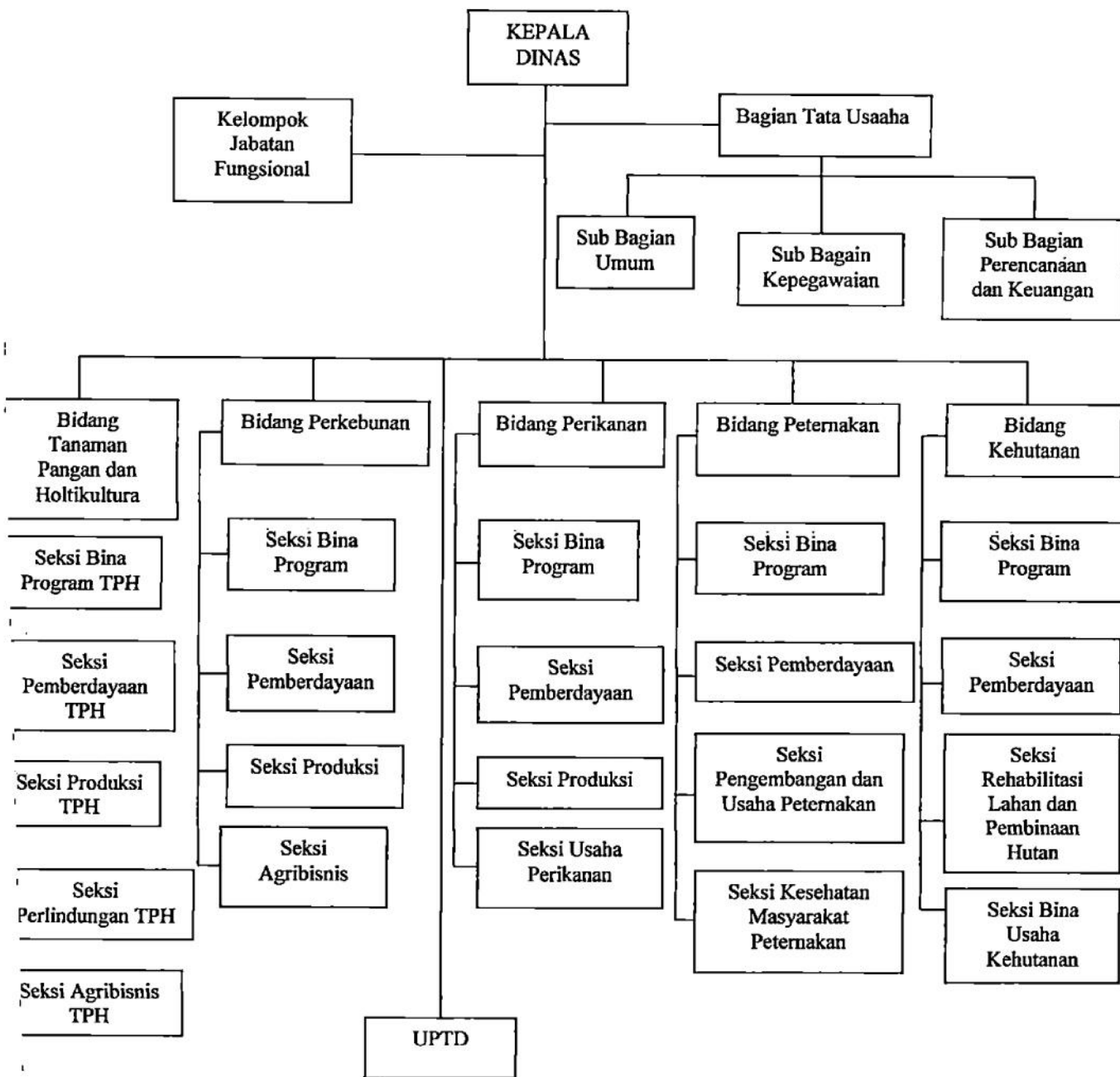
tanggal 3 Maret 2001 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan pengabungan dari lima dinas pada masa sebelum penerapan otonomi daerah dan selanjutnya untuk tidak menghilangkan karakteristik dinas semula, masing-masing menjadi subdin, sehingga Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari lima subdin yaitu sub Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sub Dinas Peternakan, Sub Dinas Perikanan, Sub Dinas Perkebunan, Sub Dinas Kehutanan.

1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
Kabupaten Sleman

Bagan 2.1

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
Kabupaten Sleman



Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten

Sleman terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha

Tugas:

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Umum.
- b. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian.
- c. Penyelenggaraan Urusan Keuangan.
- d. Penyelenggaraan Urusan Perencanaan.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- b. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian Dinas Pertanian Dan Kehutanan.
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, rencana kegiatan, penyajian

data, evaluasi, penyusunan laporan dan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, serta pembukuan keuangan Dinas Pertanian dan Kehutanan.

3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pembangunan bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- b. penyelenggaraan pemberdayaan bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- c. pembinaan pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura
- d. pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura
- e. pembinaan, pengawasan dan pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:

- a. Seksi Bina Program TPH mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja, penyajian data, evaluasi dan penyusunan laporan bidang tanaman pangan dan hortikultura.

- b. Seksi Pemberdayaan TPH mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan petani, serta pengembangan metode dan tata penyuluhan.
 - c. Seksi Produksi TPH mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, pelayanan sarana dan prasarana produksi, serta penerapan teknologi produksi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.
 - d. Seksi Perlindungan TPH mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyelenggaraan perlindungan tanaman, serta pengaturan tata guna lahan dan air.
 - e. Seksi Agribisnis TPH mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, pelayanan pengembangan usaha, penanganan pasca panen serta pemasaran.
4. Bidang Perkebunan

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan di bidang Perkebunan.

Fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pembangunan bidang perkebunan.
- b. penyelenggaraan pemberdayaan bidang perkebunan.
- c. pembinaan pengembangan produksi perkebunan.
- d. pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan tanaman perkebunan
- e. pembinaan, pengawasan dan pengembangan agribisnis perkebunan

Bidang Perkebunan terdiri dari:

- a. Seksi Bina Program Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja, penyajian data, evaluasi dan penyusunan laporan bidang perkebunan.
- b. Seksi Pemberdayaan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan petani, serta pengembangan metode dan tata penyuluhan.
- c. Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, pelayanan sarana dan prasarana produksi, penerapan teknologi produksi serta perlindungan tanaman.
- d. Seksi Agribisnis Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pelayanan pengembangan usaha, penanganan pasca panen serta pemasaran.

5. Bidang Perikanan

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan di bidang Perikanan.

Fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pembangunan bidang perikanan
- b. penyelenggaraan pemberdayaan bidang perikanan.
- c. pembinaan pengembangan produksi perikanan.
- d. pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan perikanan.

- e. pembinaan, pengawasan dan pengembangan usaha perikanan.

Bidang Perikanan terdiri dari:

- a. Seksi Bina Program Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja, penyajian data, evaluasi dan penyusunan laporan bidang perikanan.
 - b. Seksi Pemberdayaan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan petani ikan, serta pengembangan metode dan tata penyuluhan.
 - c. Seksi Produksi Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pelayanan sarana dan prasarana produksi, penerapan teknologi produksi, serta perlindungan perikanan.
 - d. Seksi Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pelayanan pengembangan usaha, penanganan pasca panen serta pemasaran.
6. Bidang Peternakan

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan di bidang peternakan.

Fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pembangunan bidang peternakan.

- b. penyelenggaraan pemberdayaan bidang peternakan.
- c. pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan peternakan.
- d. pembinaan dan pengawasan usaha peternakan.
- e. pembinaan dan penyelenggaraan kesehatan hewan.
- f. pembinaan dan penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner.

Bidang Peternakan terdiri dari:

- a. Seksi Bina Program Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja, penyajian data, evaluasi dan penyusunan laporan bidang peternakan.
- b. Seksi Pemberdayaan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan peternak, serta pengembangan metode dan tata penyuluhan.
- c. Seksi Pengembangan dan Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, penyelenggaraan pengelolaan perbibitan, perbenihan, pakan ternak, penyebaran ternak, budidaya peternakan, dan pengembangan usaha peternakan, serta pemasaran hasil peternakan.
- d. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan pengobatan penyakit hewan, perlindungan hewan dan produk asal hewan, pengawasan obat hewan dan pakan ternak, serta pengawasan dan pengelolaan laboratorium.

7. Bidang Kehutanan

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan di bidang kehutanan.

Fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan, penataan, pengukuran dan perpetaan hutan.
- b. penyelenggaraan pemberdayaan bidang kehutanan.
- c. penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi lahan.
- d. pembinaan dan pengelolaan hutan.
- e. pembinaan usaha kehutanan.
- f. pengendalian peredaran hasil hutan.

Bidang Kehutanan terdiri dari :

- a. Seksi Planologi Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penataan, pengukuran dan perpetaan hutan, penyusunan kegiatan kerja, penyajian data, evaluasi dan penyusunan laporan bidang kehutanan.
- b. Seksi Pemberdayaan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyelenggaraan pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan petani, serta pengembangan metode dan tata penyuluhan.
- c. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pembinaan Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan penghijauan dan konservasi tanah, reboisasi,

perlindungan dan keamanan hutan, serta usaha peningkatan produktivitas hutan.

- d. Seksi Bina Usaha Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengendalian usaha kehutanan, hutan wisata, hutan rakyat dan peredaran hasil hutan.
8. UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan di bidang teknis.

UPTD Dinas Pertanian dan Kehutanan yang ada yaitu :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Budidaya Peternakan dan Pemotongan Hewan
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Kesehatan Hewan

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomot: 12 Tahun 2003 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 27/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pertanian dan

Kehutanan Berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang pertanian dan kehutanan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pertanian dan Kehutanan
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pertanian dan Kehutanan.
 - c. Pembinaan terhadap unit pelaksanan teknis dinas
- Tugas Tambahan

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman mempunyai tugas tambahan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas pengawasan terhadap *income* daerah sesuai dengan:
 - Perda Kabupten Sleman Nomor: 2 Tahun 1976 jo Perda Kabupaten Sleman Nomor: 10 Tahun 1983 jo Perda Kabupaten Sleman Nomor: 6 Tahun 1988 jo Perda Kebupaten Sleman Nomor: 11 tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Pematongan Hewan Ternak serta Pemeriksaan Daging dan hasil Ikutannya.
 - Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor: 167 Tahun 1998 tentang pengelolaan ternak pemerintah.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 2 Tahun 1995 tentang income dari kebun-kebun bibit, Balai Penih Ikan maupun Balai Penyuluhan Pertanian.

- Visi dan Misi

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi dan misinya sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya masyarakat pertanian dan kehutanan yang berdaya saing, mampu mengelola sumber daya alam secara optimal dan lestari dan menuju masyarakat yang sejahtera.

Misi

- a. Memberdayakan *Sumberdaya manusia* pertanian dan kehutanan secara profesional dan mandiri.
- b. Mengelola *sumberdaya alam* secara optimal dan lestari.
- c. Mendorong *peningkatan peran* sektor pertanian dan kehutanan *terhadap perekonomian daerah*.

Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas SDM pertanian dan kehutanan.
- b. Meningkatkan ketersediaan bahan pangan dan bahan baku industri.
- c. Sumberdaya alam dan mutu lingkungan
- d. Meningkatkan peluang usaha.

Kebijakan dan Strategis

- a. Meningkatkan kemampuan kelompok melalui pemberdayaan kelompok tani.
 - b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam berusahatani agar lebih profesional, mandiri dan tangguh.
 - c. Meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas petugas.
 - d. Meningkatkan produksi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana produksi seoptimal mungkin.
 - e. Meningkatkan kelestarian SDA dengan memperbaiki kualitas/mutu lingkungan.
 - f. Meningkatkan teknologi ramah lingkungan dalam upaya meningkatkan produksi kelestarian SDA.
 - g. Meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian dan kehutanan dalam upaya peningkatan nilai jual.
 - h. Meningkatkan daya serap penguatan modal dalam pemenuhan kegiatan usaha tani dan agroindustri.
 - i. Meningkatkan teknologi pasca panen dalam usaha member nilai tambah (*value added*).
 - j. Optimalisasi pemamfaatan sarana dan prasarana dalam melayani kebutuhan masyarakat.
- Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman adalah 417 orang yang rinci berdasarkan jabatan struktur, jabatan fungsional, pangkat dan golongan serta pendidikan seperti pada tampilan table berikut:

Tabel 2.4
Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Bidang	Jumlah Jabatan Struktural		
		Ka TU/Kabid	Subbag/Kasi	Staf
1	Sekretariat	2	4	34
2	Fungsional	-	-	-
3	Bidang TPH	1	3	22
4	Bidang Peternakan	1	3	27
5	Bidang Perikanan	1	3	13
6	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	1	3	25
7	Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	1	4	23
8	UPT Pasar Hewan dan RPH	1	1	12
9	UPT Pelayanan Keswan	1	1	23
10	UPT Terminal Agribisnis	1	1	5
11	UPT Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan	1	1	23
12	UPT BP3K Wilayah I	1	1	3
13	UPT BP3K Wilayah II	1	1	4
14	UPT BP3K Wilayah III	1	1	3
15	UPT BP3K Wilayah IV	1	1	3
16	UPT BP3K Wilayah V	1	1	2
17	UPT BP3K Wilayah VI	1	1	4
18	UPT BP3K Wilayah VII	1	1	2
19	UPT BP3K Wilayah VIII	1	1	4
Jumlah		19	32	232
Total		283		

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Tabel 2.5

Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsioanl

NO	Bidang	Jabatan Fungsional			
		PPA	PPL	PMHP	Arsiparis
1	Fungsioanl	12	103	18	1
Jumlah		134			

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Tabel 2.6

Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Bidang	Berdasarkan Perangkat/Gol			
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV
1	Sekretariat	5	13	20	2
2	Fungsional	-	2	121	11
3	Bidang TPH	-	4	21	1
4	Bidang Peternakan	-	7	21	3
5	Bidang Perikanan	-	1	15	1
6	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	-	5	23	1
7	Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	-	4	24	-
8	UPT Pasar Hewan dan RPH	-	5	9	2
9	UPT Pelayanan Keswan	-	10	13	-
10	UPT Terminal Agribisnis	-	1	6	-
11	UPT Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan	-	11	14	-
12	UPT BP3K Wilayah I	1	1	3	-
13	UPT BP3K Wilayah II	-	2	4	-
14	UPT BP3K Wilayah III	-	-	5	-
15	UPT BP3K Wilayah IV	-	2	3	-
16	UPT BP3K Wilayah V	1	1	2	-
17	UPT BP3K Wilayah VI	-	1	5	-
18	UPT BP3K Wilayah VII	-	1	3	-
19	UPT BP3K Wilayah VIII	-	-	6	-
Jumlah		7	71	318	21
Total		417			

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Tabel 2.7

Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Bidang	Berdasarkan Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	D.III	S. 1	S. 2
1	Sekretariat	1	5	18	2	8	6
2	Fungsional	-	-	23	56	54	1
3	Bidang TPH	-	-	13	2	8	3
4	Bidang Peternakan	-	-	13	5	13	-
5	Bidang Perikanan	-	-	6	1	8	2
6	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	-	-	14	2	11	2
7	Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	-	-	7	4	17	-
8	UPT Pasar Hewan dan RPH	-	-	6	3	5	-
9	UPT Pelayanan Keswan	1	1	1	9	13	-
10	UPT Terminal Agribisnis	-	-	1	2	3	1
11	UPT Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan	4	1	15	3	2	-
12	UPT BP3K Wilayah I	-	1	2	-	2	-
13	UPT BP3K Wilayah II	-	-	4	1	-	1
14	UPT BP3K Wilayah III	-	-	2	2	1	-
15	UPT BP3K Wilayah IV	-	-	3	1	1	-
16	UPT BP3K Wilayah V	-	1	1	-	1	1
17	UPT BP3K Wilayah VI	-	-	3	-	2	1
18	UPT BP3K Wilayah VII	-	-	1	1	2	-
19	UPT BP3K Wilayah VIII	-	-	3	1	2	-
Jumlah		6	9	136	95	153	18
Total		417					

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

C. Deskripsi Pasar Hewan Ambarketawang Gamping Kabupaten Sleman

Pasar Hewan Ambarketawang Gamping yang terletak di Bulak Bengkok, Watu Langkah, Ambarketawang, Gamping diresmikan Kamis, 16 maret 2006. Peresmian dilakukan oleh Bupati Sleman Drs. Ibnu Subiyanto, Akt. dan Walikota Yogyakarta Herry Zudianto dihadiri pula oleh Wakil Walikota H. Syukri Fadoli, Muspida dan pejabat terkait dari Pemkab Sleman dan Pemkot Yogyakarta. Pasar Hewan Ambarketawang merupakan pindahan dari pasar Kuncen Kota Yogyakarta, dengan demikian pasar Kuncen saat ini sudah tidak ada lagi dan ditandai dengan boyongan para pedagang ke pasar hewan Ambarketawang Gamping. Pada Kesempatan ini Walikota Yogyakarta mengungkapkan bahwa hijrahnya para pedagang diibaratkan Hijrahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga diharapkan kepindahan ke tempat baru nantinya akan menjadi lebih baik. Karena saat ini pasar Kuncen yang berada di pusat Kota Yogyakarta dirasa sudah kurang tepat, sehingga perlu dicarikan alternatif lokasi yang lebih baik dan ketemunya di Ambarketawang Gamping Sleman.

Sementara itu Kepala Bidang Peternakan Sleman Ir Suwandi Azis menjelaskan bahwa pasar hewan Ambarketawang dibangun diatas tanah kas desa Ambarketawang seluas 3,7 Ha. Dimulai pembangunan sejak tahun 2003 dengan adanya kesepakatan Pemkot Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang relokasi Pasar Hewan Kuncen. Untuk dana yang telah dikeluarkan sampai tahun 2005 mencapai Rp 4,4, meliputi pembangunan pasar Rp 2,2 M, kantor Rp 220 Juta, halaman Rp 1,1 M dan fasilitas umum Rp 880 juta. Sarana yang di bangun meliputi loket, penimbangan ternak, tambatan kambing dan sapi, jalan di

lingkungan pasar, tempat duduk pedagang, los burung dan PKL, jaringan air bersih serta pengolahan limbah. Sedangkan untuk tahun 2006 akan dilanjutkan pembangunan dengan menggunakan dana APBD Sleman Rp 1,9 M, dan APBN Rp 603,5 Juta. Peresmian pasar ditandai dengan penyerahan sapi simetal oleh Walikota Yogyakarta kepada Bupati Sleman disaksikan Wakil Walikota dan Ketua DPRD Sleman serta pejabat lainnya.

Dalam kesempatan ini Bupati Sleman Drs. Ibnu Subiyanto, Akt mengemukakan bahwa pembangunan pasar hewan ini merupakan jawaban dari dua pemerintah daerah, yakni Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman atas aspirasi para pedagang hewan yang beraktifitas di pasar hewan Kuncen. Mereka pada intinya merasa kurang nyaman lagi beraktifitas di pasar hewan Kuncen dan mengharapkan dibuatkan pasar hewan yang letaknya di pinggir kota dan transportasinya mudah. Tentu saja sebagai pemerintah daerah, kita berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat termasuk kepada para pedagang hewan. Oleh karena itu sejak tahun 2002 Pemkot Yogyakarta dan Pemkab Sleman telah menjalin komunikasi untuk memenuhi aspirasi tersebut dan mengkaji pemanfaatan yang lebih berguna bagi masyarakat Kota Yogyakarta tentang lokasi Pasar Hewan Kuncen dan pemindahan ke Ambarketawang Gamping.

Lebih lanjut Ibnu menambahkan pembangunan pasar hewan Ambarketawang Gamping ini telah melalui kajian dan studi kelayakan yang cermat dan teliti. Semua itu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik dan

memberi fasilitas tempat jual beli ternak kepada para pedagang ternak di Kabupaten Sleman khususnya, dan DI. Yogyakarta pada umumnya.

Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan (RPH) untuk pertama kalinya di operasionalkan pada hari Selasa Pahing tanggal 21 Maret 2006 setelah diresmikan oleh Bupati Sleman Kabupaten Sleman pada hari Kamis Pahing tanggal 16 maret 2006. Dalam perjalanannya banyak hal telah dicapai, namun demikian beberapa kendala sempat muncul tetapi berhasil diatasi. Aktivitas kegiatan di Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan (RPH) sudah berjalan selama ± 4 tahun 7 bulan sampai bulan November 2010 dan tahun ini merupakan tahun keempat dimana pelayanan terhadap pengguna pasar diberikan.

Pada tahun 2007 untuk pertama kalinya pasar hewan melaksanakan penggunaan anggaran untuk kegiatan pengelolaan pasar secara mandiri, hal ini dikarenakan status Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) baru ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2006 berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No. 18 /Per.Bup/2006, sebelumnya pasar hewan berbentuk lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No. 2/Per.Bup/2006 dan ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2006. Mulai awal tahun 2010 dengan adanya Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru Kabupaten Sleman nama Pasar Hewan berubah menjadi UPT Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor : 64/ Per.Bup/2009 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2009.

Selama tahun 2010 perkembangan yang terjadi di UPT Pasar Hewan Ambarketawang dan RPH begitu pesat ditinjau dari berbagai sisi seperti kelengkapan sarana dan prasarana, jumlah ternak dan pedagang, kendaraan baik mobil maupun sepeda motor yang masuk, maupun dari ternak yang terjual beserta nilai transaksinya.

Gambar 2.2

Dena UPT Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong

